Respon Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Menangkap Peluang Pengembangan Pariwisata di Bawean

Pudjio Santoso

psantoso.unair@gmail.com

(Departemen Antropologi Fisip-Universitas Airlangga, Surabaya)

Abstract

The development of tourism sector always attracts attentions because of different views between those that supports and those that do not. Meanwhile, there is an alternative approach that is rarely utilized, which is emphasizing its positive aspects, primarily the improvement of local people's economy, and suppressing its negative aspects by using regulations at national, provincial, or regional and local levels. One region that is currently being developed is the Island of Bawean that has beautiful nature and culture. This development is certainly being responded positively by some people who see it as work opportunities, but others are anxious and afraid if this development will erode religious (Islamic) norms and values that have been preserved well until today. This study found that in the Village organizational level, this economic opportunity has not been fully utilized even though regulation instruments such as Village Regulation (Undang-undang Desa), Government Regulation (Peraturan Pemerintah), and Regulation of Ministry of Village (Permendes) regarding Village finance and Village-owned Enterprise (BUMDesa) has been established. On the other hand, people saw that Tourism development in Bawean will bring impacts on their economy and livelihood. They will no longer need to go abroad to earn a living.

The lack of response from the Village to capture the economic opportunity of tourism development is related with the lack of understanding from the village administrators and community leaders about Village-owned Enterprise and types of businesses that is viable for the Village-owned Enterprise.

Key words: *Tourism Development, Respond, Village-owned Enterprise, Bawean.*

Abstrak

Pengembangan sektor pariwisata selalu menarik perhatian karena adanya perbedaan pandangan antara yang pro dan anti. Padahal ada satu pendekatan alternatif yang jarang dipakai, yakni melihat pengembangan pariwisata dari sisi positif terutama meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, sedangkan sisi negatifnya ditekan sedemikian rupa melalui regulasi baik di tingkat pusat, propinsi maupun daerah dan lokal. Pulau Bawean yang memiliki keindahan alam dan budaya saat ini sedang dikembangkan. Pengembangan ini tentu saja direspon secara positif oleh sebagian masyarakat sebagai peluang kerja, namun adapula yang cemas dan takut jika pengembangan tersebut menggerus nilai-nilai dan norma keagamaan (Islam) yang selama ini masih terjaga dengan baik. Kajian yang dilakukan ini menyimpulkan bahwa pada tingkat kelembagaan Desa, peluang ekonomi ini belum ditangkap secara baik meskipun perangkat aturan (Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Permendes) tentang keuangan Desa dan BUMDesa sudah ada. Sementara itu masyarakat melihat pengembangan Pariwisata di Bawean akan membawa dampak pada perubahan ekonomi dan ketenagakerjaan. Mereka tidak perlu lagi merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah.

Belum responsifnya Desa menangkap peluang ekonomi pengembangan pariwisata ini tidak terlepas dari pemahaman yang kurang dari perangkat desa serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap BUMDesa dan jenis-jenis usaha apa saja yang layak diBUMDesa-kan.

Kata Kunci: Pengembangan Pariwisata, Respon, BUMDesa, Bawean.

Sektor pariwisata sejak lama dianggap sebagai sebuah industri terbesar ketiga di dunia setelah minyak dan gas (migas), serta peralatan elektronik. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) yang dikutip dari Fandeli (2003:22), sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan sebesar US \$3,5 triliun atau 6% pendapatan kotor dunia.

Sebagai sebuah industri tanpa asap, pariwisata acapkali dianggap sebagai sektor ekonomi yang tak tampak dari sisi angka statistik. Hal ini karena sektor pariwisata tidak saja berdampak pada pertumbuhan kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata maupun meningkatnya tingkat okupansi hotel-hotel yang ada di sekitar obyek wisata tersebut.

Pertumbuhan pariwisata secara tidak langsung berakibat pada sektor pertanian yang memasok kebutuhan bahan baku untuk kuliner hotel dan restoran, industri-industri yang menghasilkan perlengkapan hotel seperti sabun, sampo dalam kemasan kecil serta handuk. Dengan demikian terjadi akibat ganda dari pariwisata (*multiplier effect*). Yoeti (2006: 136) menggambarkan efek ganda yang ditimbulkan dari pariwisata ibarat sebuah batu yang dilempar ke

dalam suatu kolam dimana pengaruhnya tidak saja pada tempat batu tersebut jatuh, tetapi juga terjadi di sepanjang riak gelombang yang ditimbulkannya.

Kecenderungan yang positif secara ekonomi itulah yang mendasari semua negara dan daerah berlomba-lomba mengembangkan sektor pariwisata sebagai andalan dalam menyumbang devisa. Berbagai model pariwisata dikembangkan secara besar-besaran bahkan untuk daerah atau negara yang kurang mempunyai daya pesona alam dan budaya, mereka mengembangkan wisata *Hi-tech* (mengandalkan kecanggihan teknologi permainan hiburan).

Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya sangat serius dalam membangun dan mengembangkan pariwisata, mulai dari infrastruktur jalan menuju Daerah Tujuan Wisata (DTW), obyek-obyek wisata baru, hotel dan restoran. Di samping itu berbagai produk hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dikeluarkan. Misalnya, Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan Pariwisata adalah: 1) mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan

kualitas pariwisata nasional; 2) berbasis pemberdayaan masyarakat, kesenian, dan sumber daya (pesona) alam lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat, dan (3) mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri. [Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisataan pada Bab IV pasal 6 menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Di samping itu dalam penentuan kawasan wisata di suatu daerah perlu diperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat. Di tingkat daerah banyak peraturan daerah (Perda) yang bermunculan seolah-olah berlomba seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Artikel ini membahas tentang respon masyarakat dan pemerintah lokal (desa) dalam melihat peluang ekonomi pengembangan wisata di pulau Bawean, Gresik. Hal ini menarik untuk dikaji dan dibahas mengingat selama ini secara ekonomi, masyarakat Bawean mengan-

dalkan pada pekerjaan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, Singapura, Hongkong dan beberapa negara lainnya. Kondisi geografis yang cukup terisolir oleh lautan serta hanya mengandalkan pada kemurahan hasil laut itulah yang menyebabkan mereka merantau ke luar negeri. Seiring dengan makin terbukanya akses ke pulau Bawean baik melalui laut (ada kapal ekspres cepat dan kapal Ro-Ro), serta pesawat terbang 2 kali seminggu, maka kekayaan alam dan budaya Bawean yang selama ini belum banyak diketahui orang luar menjadi alternatif peluang pekerjaan bagi masyarakat Bawean yang tidak ingin merantau ke luar negeri. Di samping itu citra orang Bawean yang agamis menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata yang selalu identik dengan 5 S (Sun, Sea, Sand, Scene, Sex).

Bukan saja masyarakat secara individu yang diuntungkan dengan pengembangan pariwisata, namun melalui pemerintah lokal (desa) peluang ekonomi pengembangan pariwisata ini juga dapat dikelola secara lebih baik melalui kelembagaan desa. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya UU no. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa. UU tersebut mengamanatkan pada pemerintah untuk mengembangkan

wilayah perdesaan melalui 4 bidang kewenangan (Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa). Guna mewujudkan amanat tersebut pemerintah menggelontorkan anggaran per desa antara 1 hingga 1,5 milyar per desa per tahun. Akan tetapi karena kondisi keuangan negara saat ini yang belum mencukupi, maka baru terealisasi sekitar 60%.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan format deskriptif, Menurut Muhajir (1996:29) penelitian kualitatif lebih banyak mendasarkan pada pengumpulan dan penyajian data secara verbal dan bukan dalam angka-angka statistik. Demikian pula Bogdan dan Tylor yang dikutip dari Moleong (2004) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Ciri penting dari penelitian kualitatif adalah penekanannya pada aspek keluasan dan kedalaman dari data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan

para informan subyek, informan pendukung serta observasi atau pengamatan terhadap potensi wisata yang ada di Bawean, serta aktivitas masyarakat di sekitar obyek-obyek yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata, dan data statistik baik dari monografi desa maupun kecamatan. Karena luas dan meratanya lokasi obyek wisata di Bawean, maka penelitian ini fokus pada masyarakat desa Kebun Teluk Dalam kecamatan Sangkapura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dermaga penyeberangan terapung menuju tempat wisata Gili Timur yang dibangun pemerintah kabupaten Gresik berada atau dimiliki oleh desa Kebuntelukdalam, namun lokasi wisata Gili Noko berada dalam wilayah administratif desa Sidogedungbatu. Hal yang menarik adalah pada saat perencanaan pembangunan dermaga terjadi tarik ulur antara kedua desa tersebut.

Di samping itu, desa Kebuntelukdalam juga memiliki beberapa obyek wisata yang sampai saat ini masih dikenal secara lokal Bawean saja. Wisatawan dari luar Bawean tidak banyak yang tahu selain terkendala akses jalan menuju tempat-tempat wisata tersebut.

Wawancara dilakukan terhadap kepala desa Kebuntelukdalam, nelayan yang mengantar wisatawan menyeberang ke pulau Gili, pegawai UPTD Pariwisata pulau Bawean.

Hasil dan Pembahasan

Secara sederhana respon seperti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) adalah suatu tanggapan, reaksi, dan jawaban. Sedangkan konsep lain lebih dekat dengan ilmu Psikologi, mengatakan bahwa respon adalah suatu tingkah laku atau sikap, baik sebelum pemahaman yang rinci, penilaian, pengaruh, penolakan, suka atau tidak maupun pemanfaatan pada suatu fenomena. Jadi berbicara mengenai respon dari perspektif psikologi berarti berbicara tentang persepsi, sikap dan partisipasi (Adi, 1994: 105). Oleh sebab itu membuat kajian tentang respon selalu terkait dengan pengukuran kuantitatif dan responden. Namun demikian dalam kajian antropologi penggunaan konsep respon dapat diterapkan secara kualitatif dan menggunakan informan atau subyek penelitian. Respon sebagai perilaku yang muncul karena adanya rangsangan dari lingkungan. Atau dengan kata lain, munculnya perilaku baru karena adanya rangsangan yang masuk dalam diri

seseorang. Rangsangan baru tersebut dapat berupa situasi, obyek, maupun peristiwa. Dalam kaitannya dengan kajian ini, rangsangan itu adalah adanya upaya dari pemerintah untuk mengembangkan kepariwisataan di Bawean. Hal ini terlihat dari adanya lapangan terbang perintis yang berada di kecamatan Tambak, yang diresmikan penggunaannya sejak awal tahun 2016. Selain itu perbaikan jalan lingkar Bawean yang menghubungkan kecamatan Sangkapura dan kecamatan Tambak, dan pembangunan dermaga apung di desa Kebuntelukdalam sebagai akses menuju tempat wisata pulau Gili Noko.

Adanya sesuatu yang "baru" dalam masyarakat meskipun memberikan manfaat positif dari sisi ekonomi, namun direspon secara berbeda karena adanya aspek yang dapat mengganggu konstelasi budaya setempat. Oleh sebab itu perlu juga dipahami beberapa konsep dan teori tentang pariwisata. Sebagai sebuah industri tanpa asap, pariwisata memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut (Spillane, 1994:39):

- 1) Produk pariwisata tidak dapat disimpan karena berupa jasa atau pelayanan yang hanya dinikmati pada saat seseorang berada di tempat wisata.

- 2) Permintaan produk wisata sangat dipengaruhi oleh musim-musim tertentu (*highly seasonal*) khususnya terkait masa liburan.
- 3) Permintaan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar wisata itu sendiri yang acapkali sulit diprediksi (*unpredictable*) seperti perubahan dalam kurs valuta, gangguan keamanan, masalah politik, serta perubahan iklim/cuaca yang tiba-tiba termasuk bencana alam.
- 4) Pariwisata sangat elastis terhadap harga dan pendapatan. Naik turunnya harga dan pendapatan sangat mempengaruhi akan permintaan konsumsi dan pelayanan pariwisata.

Keempat ciri pariwisata di atas penting dipahami oleh masyarakat Bawean yang memanfaatkan peluang pariwisata. Hal ini karena akses menuju ke pulau Bawean masih sangat tergantung pada kondisi ombak laut. Meskipun ada sarana transportasi pesawat terbang, tetapi karena jadwal penerbangannya yang hanya 2 kali seminggu serta pesawat kecil jenis Twin Otter kapasitas 12 penumpang, tentu sangat tidak memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Bawean pada 2014 tercatat sebanyak 6.995 orang (6.744 orang

wisnus dan 251 wisman) yang berkunjung ke tempat-tempat wisata. Tahun 2015 sedikit meningkat, sebanyak 7.801 orang (6.965 orang wisnus dan 836 orang wisman) yang berkunjung ke Bawean, dan tahun 2016 hingga bulan Juni, terdapat 4.289 orang (4.247 orang wisnus dan 42 orang wisman).

Sayangnya data kunjungan wisatawan yang ada di UPTD Pariwisata Bawean tidak memilah wisatawan lokal Bawean dan yang dari luar Bawean. Hal ini penting untuk bisa mengukur sejauh mana obyek-obyek wisata yang ada di Pulau Bawean telah dikenal dan dapat menarik wisatawan dari luar Bawean, khususnya wisatawan mancanegara.

Terlepas dari data wisatawan yang kurang spesifik, adanya lapangan terbang di Bawean membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Geliat perdagangan dalam bentuk minimarket, penginapan, rental kendaraan dan agen wisata sudah tampak. Pada tahun 2014 hanya terdapat sebanyak 6 hotel/penginapan, kemudian tahun 2015 bertambah 2 menjadi 8 hotel dan tahun 2016 sudah ada 10 hotel/penginapan. Demikian pula dengan jasa atau agen wisata. Pada tahun 2014 hanya ada 3, dan saat ini sudah terdapat 5, yakni Hans Tourguide, Keliling Bawean, Tasek Tanean, Bawentrip.Com, dan

Bawean Tourism. Jasa yang ditawarkan mulai dari penjemputan di Bandara, pemesanan penginapan, menjadi pemandu wisata dalam mengunjungi tempat wisata, dan juga mengurus proses kepulangan wisatawan.

Di samping itu banyak masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan memanfaatkan peluang ini dengan membuka minimarket, cinderamata berupa kaos dan topi bergambar wisata Bawean, serta kuliner. Salah satu usaha kuliner yang khusus menyediakan menu ikan bakar terletak di pinggir jalan menuju dermaga apung kebuntelukdalam. Menurut pemiliknya, tempat makannya baru dibuka tahun 2016 ini karena berharap dengan adanya pembukaan bandara dan tersedianya dermaga apung akan banyak wisatawan yang datang ke Bawean. Di pulau Gili Noko sendiri saat ini banyak ditemui kedai-kedai makan dan minum. Harapan masyarakat di sekitar tempat wisata banyak wisatawan yang berkunjung ke sana.

Perubahan jenis pekerjaan juga terlihat dari para nelayan yang selama ini mengandalkan mencari ikan, kini berubah menjadi menyewakan perahunya bagi wisatawan yang ingin mengunjungi

Gili Noko, seperti yang diungkapkan seorang informan nelayan:

"Saya dulu ya nelayan, trus sekarang sudah gak nyari ikan tapi nganter wisatawan saja. Kalo ada telepon disuruh ngantar orang ya sudah langsung berangkat. Kalo gak ada telpon ya di rumah nunggu dipanggil".

Perubahan pekerjaan tersebut karena saat ini semakin susah memperoleh ikan dalam jumlah banyak kalau hanya mencari pada jarak 7 mil. Sementara kalau jarak jauh, pengeluaran bahan bakarnya juga banyak. Sedangkan mengantar wisatawan menyebar dengan tarip Rp.250.000 PP dan jarak sekitar 4 mil hanya butuh bahan bakar sekitar 4 liter. Rerata sehari mengantar 2 kali, sehingga keuntungan bisa Rp.400.000 sehari. Seperti yang dikemukakan pak Kusen (nelayan): "Iya, lebih banyak ngantar wisatawan, lumayan cukup buat sehari-sehari dibanding nyari ikan".

Sebagai sebuah daerah yang sangat kental atmosfer agama Islamnya, mengembangkan sebuah kawasan wisata terutama yang berbasis laut atau bahari tentu sangat tidak mudah. Berbagai contoh yang ada seperti Bali dan Lombok membuat mereka---terutama para Ulama dan guru-guru---takut jika Bawean banyak dikunjungi wisatawan dan masyarakatnya berubah jauh dari norma-

norma dan kesantunan menurut kaidah agama Islam. Namun upaya yang dilakukan oleh berbagai warga masyarakat, baik pejabat pemerintah, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di Bawean mampu meluluhkan paham konservatisme para ulama. Menurut beberapa informan kehadiran wisatawan nusantara, apalagi yang berasal dari pulau Bawean yang mengunjungi obyek-obyek wisata tidak ada masalah baik prilakunya maupun busana seperti yang disampaikan oleh Kades Sidogedong Batu:

"Sejauh ini tidak masalah ya. Mereka baik-baik saja. Pengunjung masih orang-orang sini aja. Kedepannya, kalau orang asing ke sini harus mengikuti peraturan yang berlaku di sini. Berpakaian yang sopan menurut adat-istiadat orang melayu, bertingkah-laku yang baik supaya kami juga segan".

Kekhawatiran tokoh masyarakat Bawean bukan tanpa sebab, karena saat ini kriminalitas yang selama ini Bawean terkenal dengan daerah yang paling aman dari gangguan kriminalitas, telah menunjukkan peningkatan. Hal ini seperti yang dikatakan Ustadz Fauzi dari desa Kebuntelukdalam:

"Sekarang ini perkembangan kriminalitas di Bawean semakin lama semakin meningkat. Kalau dulu, rumah tidak di kunci tidak apa-apa. Walaupun di ting-

gal layar ke mana-mana tetapi tidak ada barang yang hilang. Tetapi kalau sekarang meninggalkan rumah tanpa di kunci ya khawatir juga, kalau sepeda motor mungkin aman-aman saja walaupun ada kejadian beberapa tahun yang lalu yaitu dua sepeda motor hilang. Dari sisi kriminalitas, makin ke sini makin naik. Misalkan sudah ada narkoba, ada juga oplosan. Komix itu bapak dan ibu sekalian, ada juga di sini. Nah, itu yang mengkhawatirkan kita belum menjadi pulau wisata sudah seperti ini. belum ada rombongan turis ke sini sudah seperti itu".

Kriminalitas yang terjadi tidak sebatas pencurian, tetapi juga narkoba dan mabuk-mabukan. Hanya bedanya, mereka mabuk bukan dengan minuman keras, tetapi mengoplos (mencampur) minuman ringan dengan beberapa *sachet* Komix (obat batuk). Kekhawatiran semacam itulah yang selama ini menjadi wacana di kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagian pendidik yang ada di Bawean. Pendapat yang berbeda tentang kenakalan anak remaja dikemukakan oleh salah seorang informan seorang pemuda bahwa anak-anak yang dititipkan pada sanak saudaranya karena orangtua bekerja di luar negeri, acapkali terabaikan. Ketika di rumah mereka diajari norma susila dan agama, namun pada malam hari anak-anak ini tidak terpantau aktivitasnya. Di sinilah anak-anak tersebut melakukan aktivitas menyimpang ("ngomix" dan berpakaian yang kurang sopan).

Pada tingkat kelembagaan desa, peluang ekonomi dari pariwisata ini belum "ditangkap" secara baik oleh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Menurut kepala desa Kebuntelukdalam, untuk saat ini masih disusun perangkat aturan yang mendukung BUMDesa. Selama ini belum ada juklak dan juknis pendirian BUMDesa dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan, sehingga mereka kesulitan jika hanya mengandalkan pada Peraturan Pemerintah dan Permendagri tentang pendirian BUMDesa. Menurut Hastowiyono dan Suharyanto (2014), permasalahan kelembagaan pendirian BUMDesa dapat dilihat dari aspek internal dan eksternal. Aspek internal meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien, serta keterbatasan modal. Sedangkan permasalahan eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, kurangnya pengalaman, serta infrastruktur yang kurang mendukung. Dari sisi SDM, manajemen, serta infrastruktur tampaknya yang menjadi hambatan bagi desa-desa di Bawean dalam mendirikan BUMDesa.

Khususnya desa Kebuntelukdalam yang menjadi fokus kajian ini mempunyai potensi ekonomi yang mendukung

pengembangan pariwisata, dan layak untuk didirikan BUMDesa. Di desa ini terdapat madu lebah hutan yang diperdagangkan sampai ke Malaysia melalui jaringan TKI. Di samping itu juga ada industri rumahtangga gula aren, serta anyaman bambu. Industri gula aren masih terkendala jumlah tenaga kerja serta musim hujan karena air nira tidak bisa di"deres" (diambil airnya).

Oleh karena kendala-kendala tersebut serta belum adanya studi kelayakan usaha, maka hingga saat ini pemerintah desa belum berani menggagas pendirian BUMDesa selain sebatas mempersiapkan peraturannya. Di sisi yang lain, desa juga telah membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Melalui Pokdarwis ini digagas ide-ide apa saja yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dalam menyongsong Bawean sebagai daerah tujuan wisata. Boleh dikatakan kelompok ini dipakai sebagai media sosialisasi bagi masyarakat luas untuk mengenal lebih jauh pariwisata semacam apa yang akan dikembangkan di Bawean, serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan jika sudah mulai banyak wisatawan yang datang ke desa.

Penutup

Pengembangan pariwisata di Bawean saat ini sudah dimulai dengan dibukanya lapangan terbang perintis yang terletak di kecamatan Tambak serta pembangunan dermaga apung tempat wisatawan naik perahu motor menuju pulau Gili Noko. Meskipun awalnya banyak penolakan dari tokoh masyarakat dan agama namun akhirnya mereka bisa memahami bahwa perubahan pasti terjadi dan melalui regulasi yang ketat maka dampak negatif dari pengembangan tersebut bisa diminimalisir.

Respon positif dari masyarakat adalah adanya peluang ekonomi yang pasti tumbuh seiring makin banyaknya wisatawan yang berkunjung. Orang yang pernah bekerja di luar Bawean serta memiliki modal yang berani mengambil peluang ini. Beberapa di antaranya membuka usaha kuliner, penginapan serta *minimarket*.

Respon pemerintah Desa dalam menangkap peluang ekonomi dari pengembangan pariwisata belum tampak, kecuali sebatas penyusunan tata aturan yang menjadi landasan pendirian BUMDesa. Meskipun dari segi permodalan, keuangan desa sudah bisa memodali BUMDesa namun tanpa adanya studi kelayakan usaha serta penyiapan

pasar, manajemen dan monitoring tentu semuanya akan sia-sia dan akhirnya usaha tersebut pailit.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adi, Isbandi Rukminto (1994) *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-dasar Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Yoeti, Oka A. (2006) *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fandeli, Chafid (2003) *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Fak. Kehutanan-UGM.
- Moleong, J. Lexy (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muhajir, Noeng (1996) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Spillane, James J (1994) *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hastowiyono dan Suharyanto (2014) *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha Bum Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).